

Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa

Tawalinuddin Haris

ABSTRACT *Bima is a region that has been attracting researchers' attention, which should not be surprising because it has always been a multicultural region. Its history reveals that Bima was one of the sailing routes, especially of the Malay Muslim traders, sailing from the direction of East Java. Bima then became a center of the Islamic rule in the eastern Nusantara. This paper discusses a brief history of how Bima became a center of Islamic rule that was strongly influenced by the Malays.*

KEYWORDS *Bima, Islam, islamisasi, sultan, pedagang Muslim.*

Bima adalah kota otonom dan nama sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa lalu Bima merupakan salah satu pusat kekuasaan Islam yang terpenting di Pulau Sumbawa, bahkan di kawasan Nusa Tenggara.¹ Menurut legenda, nama Bima diambil dari nama Sang Bima, seorang bangsawan Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah itu menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Bima. Di dalam legenda itu diceritakan bahwa Sang Bima mempunyai kekasih seekor naga dari Pulau Sitonda. Naga itu hamil karena pandangan mata Sang Bima dan darinya lahir seorang putri yang cantik sekali bernama Tasi Saring Naga. Sang Bima lalu mengawini putrinya dan dari perkawinan itu lahir Indra Jamrut dan Indra Komala yang kelak menjadi cikal bakal penurun raja-raja dan sultan-sultan Bima dan Dompu.

Menurut Morris (1890), selama keberadaan Kesultanan Bima, ada 49 raja dan sultan yang pernah memerintah di Bima. Maharaja Sang Bima ditempatkan pada urutan ke-11, sedangkan dalam catatan Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduy (1987b), ada 26 raja atau sultan, mulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Sultan Ibrahim. Sesungguhnya sejak muncul sebagai pusat kekuasaan Islam hingga tahun 1950, Kesultanan Bima diperintah oleh empat belas sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620–1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915–1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir (lihat Lampiran tulisan ini). Namun, hal itu tidak

¹ Setelah kemerdekaan (sekitar tahun '50-an) kawasan Nusa Tenggara dikenal sebagai kepulauan Sunda Kecil, mulai dari Pulau Bali sampai Pulau Timor, yang saat ini dibagi menjadi tiga provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain Kerajaan Bima, di Pulau Sumbawa terdapat kerajaan Sumbawa, Dompu, Sanggar, Tambora, dan Papekat.

berarti bahwa data tersebut keliru karena, ketika Braam Morris menulis artikelnya pada tahun 1890 dan Rouffaer berkunjung ke Bima pada tahun 1910 yang sedang memerintah di Bima adalah Sultan Ibrahim (1881 – 1915) sebagai sultan yang ke-13. Meskipun demikian, nama raja-raja Bima sebelum Islam masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh para peneliti sebelumnya, diperoleh informasi bahwa sampai dengan abad ke-19, Kerajaan Bima meliputi bagian timur Pulau Sumbawa, Flores Barat (Manggarai), dan pulau-pulau kecil di Selat Alas yang berjumlah 66 buah (Van Dijk 1925). Sejak kapan Manggarai menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Bima belum diketahui secara pasti: Abdullah (1981/1982) mencatatnya pada masa pemerintahan Manggampo Donggo (Abdullah 1981/1982) pada sekitar abad ke-14, sementara dalam sumber VOC (*Daghregister*), pada tahun 1661 Manggarai dicatat sebagai wilayah kekuasaan Bima (Coolhas 1942: 162). Wilayah Kerajaan Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Selat Sape, di sebelah selatan dengan Lautan Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Dompo (Haris 1997: 6). Secara lebih terperinci, van Hollander (1908: 75) menggambarkan batas antara Bima dan Dompo dengan sebuah garis pada $118^{\circ} 37'$ di pantai utara ke arah selatan melalui Gunung Wawo-Sahe ke arah $118^{\circ} 38' 30''$ di pantai selatan. Adapun menurut catatan Kerajaan Bima, batas itu dimulai dari Doro Dewa pada $118^{\circ} 31'$ di pantai utara terus ke selatan melalui puncak Gunung Doro Mandompo menuju ke Kampung Pajo, lalu ke arah selatan menuju ke Wadu Nteli Mayaga, Wadu Lepi, kemudian membelok ke barat menuju ke Wadu Udu, dekat Kampung Dompo bernama Daha. Selanjutnya, dari sana ke arah tenggara menuju ke Wadu Suga dan akhirnya ke arah selatan ke muara Sungai Sori Soma di pantai laut selatan (Samudra Hindia) pada $118^{\circ} 34'$ (Morris 1890: 177). Batas sebelah timur Pulau Flores ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1864 mulai dari Sungai Pota di utara (termasuk wilayah Pota). Kemudian ditarik garis lurus ke arah tenggara menuju Sungai Nagaramo di pantai selatan (termasuk wilayah Ramo) karena pada tahun itu Bima melepaskan haknya atas Galenteng dan Pulau Sumba (Ismail 1988: 13; Mulyadi 1992/1993: 63).

Luas Kerajaan Bima sebagaimana tercantum dalam penjelasan kontrak antara *Gubernur Celebes en Onderhoorigheden* dan Sultan Bima pada tahun 1886 seluruhnya adalah 156 mil persegi dengan perincian di Pulau Sumbawa ditambah dengan pulau-pulau kecil seluas 71,5 mil persegi dan di Pulau Flores seluas 84,5 mil persegi (Morris 1890: 176 – 177). Wilayah Kerajaan Bima di Pulau Sumbawa dibagi menjadi tiga distrik: Belo, Bolo, dan Sape, yang masing-masing diperintah oleh seorang *galarang*, kepala yang membawahi *galarang* rendahan, dan kepala-kepala kampung. Adapun Kerajaan Bima di Flores Barat atau Manggarai terdiri atas daerah Reo dan Pota, yang masing-masing diperintah oleh seorang pejabat bergelar *naib* yang bertindak sebagai wakil sultan. Para *naib* ini membawahkan para *galarang*, para *dal*, dan kepala-kepala kampung.

Dalam perkembangan kemudian, wilayah Kesultanan Bima semakin menyempit. Dalam kontrak terakhir Kerajaan Bima dengan Gubernemen Hindia Belanda pada tahun 1938 disebutkan bahwa wilayah Kerajaan Bima (*Landschap Bima*) di sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah barat oleh *Landschap Dompou*, sebelah selatan oleh Lautan Hindia, dan sebelah timur oleh *Landschap Manggarai*. Batas antara *Landschap Bima* dan *Landschap Manggarai* adalah bagian barat Selat Sape pada garis *vadem* 100, yang diukur dengan kapal-kapal pengukur pada tahun 1904–1908 (Mulyadi 1992/1993: 70). Hal itu disebabkan sejak tahun 1929, daerah Manggarai dan pulau-pulau di sekitarnya dinyatakan terpisah dari Bima, kemudian dijadikan *Neo Landschap* oleh pemerintah Hindia Belanda dan sekarang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Mulyadi 1992/1993: 70).² Sebaliknya, daerah Kerajaan Sanggar, kerajaan kecil di pantai barat daerah Semenanjung Gunung Tambora, sejak tahun 1928 digabungkan dengan Kesultanan Bima dan sekarang menjadi salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bima.³

KEMUNCULAN BIMA SEBAGAI PUSAT KEKUASAAN ISLAM

Kronik Bima atau yang lazim disebut sebagai *Bo Kerajaan Bima* mencatat bahwa pada masa Raja Bima yang ke-36, Sariese, terjadilah kontak pertama dengan orang Eropa (baca: orang Belanda), sedangkan Raja Bima yang ke-37, Sawo, adalah raja terakhir yang belum memeluk Islam. Zollinger berpendapat bahwa agama Islam pertama kali datang di Bima pada tahun 1450–1540. Adapun Sultan Bima yang pertama (Raja Bima yang pertama memeluk Islam) adalah Abdul Galir (baca: Abdul Kahir) dan agama yang baru itu datang dari Jawa (Zollinger 1850: 126). Syamsuddin (1980: 292–300) menghubungkan kedatangan agama Islam di Bima dan daerah sekitarnya dengan masa kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara pada tahun 1400–1511. Ia berasumsi bahwa setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, pedagang Muslim yang juga bertindak selaku mubalig itu mencari daerah baru atau kembali ke Jawa atau Sumatra untuk meneruskan kegiatannya. Di antara mereka ada yang singgah di Bima, lalu menyebarkan agama Islam dalam perjalanannya dari Jawa ke Maluku atau sebaliknya. Tomé Pires melaporkan bahwa rute pelayaran perdagangan dari Melaka ke Maluku atau sebaliknya melewati Jawa dan Bima; di Bima para pedagang menjual barang dagangan yang dibawa dan dibeli dari Jawa, kemudian membeli pakaian (kain kasar) dengan murah untuk dijual (ditukar) dengan rempah-rempah di Banda dan Maluku (Corteseo 1944: 203). Adanya rute pelayaran perdagangan yang melewati pantai utara Jawa menyebabkan hubungan antara Melaka dan beberapa kota di pesisir utara Jawa, terutama

² Menurut Coolhaas (1942: 168), hubungan antara Bima dan Manggarai terputus sejak tahun 1928.

³ Kesultanan Bima berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang penghapusan daerah swapraja, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

Gresik, terjalin dengan baik, karena Gresik adalah pelabuhan yang mengontrol impor rempah-rempah dari Banda dan Maluku (Meilink-Roelofs 1962: 83–84). Setiap tahun tidak kurang dari delapan buah jung tiba di Maluku, sebagian di antaranya datang dari Melaka dan sebagian lagi dari Gresik.

Dalam aktivitas penyebaran Islam di Maluku dan daerah yang disinggahi sepanjang rute pelayaran (termasuk Bima), selain pedagang Muslim dari Melaka, tentunya pedagang Muslim dari Jawa ikut berperan. Menurut Pigeaud (1967: 134), dalam kurun waktu abad ke-15 sampai 17 di Jawa, di daerah pesisir utara terdapat tiga pusat penyebaran Islam: Jawa bagian barat dengan Banten dan Cirebon sebagai pusatnya, Jawa bagian tengah dengan Demak dan Jepara sebagai pusatnya, dan Jawa bagian timur dengan Gresik dan Surabaya sebagai pusatnya. Dari Jawa Timur, Islam disebarkan ke Maluku dan Nusantara, termasuk ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Dalam *Babad Lombok* diceritakan bahwa agama Islam dibawa ke Lombok oleh Sunan Prapen dari Giri. Setelah berhasil mengislamkan Pulau Lombok, Sunan Prapen meneruskan perjalanannya ke timur untuk mengislamkan Sumbawa dan Bima (Faille 1918: 135–140).

Berdasarkan kajian atas sejumlah inskripsi pada makam Sultan Bima, Rouffaer berpendapat bahwa di Bima pengaruh Melayu dan Arab sangat kuat sebab inskripsi-inskripsi tersebut ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Melayu, bukan dengan huruf dan bahasa Bima atau Bugis (Noorduyn 1987: 90–91). Rouffaer sampai pada kesimpulan bahwa Islam di Bima dibawa atau datang dari Melayu, Aceh, dan Cirebon. Para penyebar Islam terutama orang Melayu, datang di Bima pada masa pemerintahan Manuru Sarehi sekitar tahun 1605 (Noorduyn 1987b: 90–91).⁴ Ditegaskan pula oleh Rouffaer bahwa Kadhi Jamaluddin yang dimakamkan di Kompleks Makam Dantraha, di samping makam Sultan Bima I, Abdul Kahir, mungkin sekali seorang yang berasal dari Melayu (*waarschijnlijk een man van Maleischen oorsprong*).

Di sebelah barat dan timur pelabuhan Bima terdapat pemukiman orang Melayu yang oleh orang Bima disebut *Kampo Malayu*, sedangkan untuk orang Melayu disebut *Dau Malayu*. Orang Melayu, sejak beberapa abad yang silam, telah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Bima. Mereka adalah pedagang yang ulet dan perantara dalam mengantarkan budaya Melayu ke daerah Bima (Syamsuddin 1980: 292). Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Sultan Abdul Kahir berpesan agar para pengantinya dan semua orang Bima menghormati orang Melayu dari generasi ke generasi dan bahwa orang Melayu tidak sama dengan orang Bugis atau pedagang dari Gowa karena mereka adalah guru Sultan Bima, dan guru orang Bima dalam agama Islam. Mereka juga dikenal sebagai perantara yang menjembatani kelompok etnik di Bima dengan orang Belanda. Selain itu, orang Melayu dianggap sangat berjasa dan menunjukkan dedikasi yang tinggi

⁴ Menurut catatan Rouffaer pada tahun 1605, orang-orang Belanda datang di Bima untuk pertama kalinya dipimpin oleh Steven van der Haghen dan mengadakan perjanjian dengan Raja Bima, Manuru Sarehi. Namun, menurut sumber lain, perjanjian itu dilaksanakan pada tahun 1611 antara Belanda dan Raja Salisi secara lisan (tidak tertulis) di Dusun Cenggu yang dikenal dengan sebutan “Sumpah Ncake” (Periksa Abdullah 1981/1982: 22).

terhadap Kerajaan Bima karena telah ikut setia dalam menumpas bajak laut sehingga banyak di antara mereka yang mati atau tenggelam di laut dalam. Oleh karena itu, sultan dan rakyat Bima sangat menghormati orang Melayu dan menganggap mereka sebagai saudara. Abdul Kahir, seorang sultan Bima, menghadiahkan sebidang tanah sebagai tempat mereka membangun perkampungan secara turun-temurun. Terkecuali itu, sebagai pedagang, orang Melayu dibebaskan dari pajak. Tidak hanya itu, sultan memberikan hak istimewa kepada para penghulu dan imam orang Melayu untuk mengatur dan mengelola perkampungan mereka menurut hukum Islam. Di samping itu, wanita Melayu tidak diperbolehkan menjadi pelayan di istana sultan, terkecuali anak laki-laki yang ditunjuk sebagai *Dambe Mone Ana Rato*, yang secara khusus bertugas menari dalam upacara *Sirih-Puan* pada bulan Maulud (Syamsuddin 1980: 296–297).

Dalam sumber lain dikatakan bahwa agama Islam dibawa ke Bima oleh Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro—dalam kronik Gowa dan Tallo, kedua tokoh ini dikenal sebagai pembawa agama Islam di Kerajaan Gowa dan Tallo (Paturu tanpa tahun). Diduga keduanya adalah orang Melayu yang datang dari Sumatra; Datuk Dibandang, khususnya, adalah seorang bangsawan Minangkabau dari Pagaruyung (Syamsuddin 1980: 296; Mulyadi 1992/1993: 15–17). Kedua mubalig ini datang di Bima sebagai utusan Sultan Gowa untuk menyebarkan Islam. Mereka, kemudian, menjadi guru agama Islam Sultan Abdul Kahir, Sultan Bima I. Pada tahun 1055 Hijrah (1645 Masehi) kedua mubalig ini dipanggil ke Makassar oleh Sultan Gowa, sedangkan tugas penyiaran agama Islam diserahkan kepada anaknya, Encik Naradireja dan Encik Jayaindra (Syamsuddin 1980: 296; Mulyadi 1992/1993: 15–17).⁵ Menurut Rouffaer, Datuk Dibandang (Datuk ri Bandang) datang ke Sulawesi Selatan sekitar tahun 1600, kemudian mengislamkan Gowa dan Tallo pada tahun 1606, sedangkan Datuk Ditiro (Datuk ri Tiro) berasal dari Aceh dan keduanya datang di Bima melalui Sape (sekarang Labuan Sape) di pantai timur, dari Sape kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sila untuk menyebarkan agama Islam (Noorduyn 1987b: 91). Bilamana Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro datang di Bima, kronik Bima menyebutkan dua angka tahun, yang pertama tahun 1013 Hijrah atau 1609 Masehi dan yang kedua tahun 1050 Hijrah atau 1640 Masehi (Syamsuddin 1980: 295–296; periksa pula Haris *et al.* [1997: 36]).

Berdasarkan kajian atas kronik-kronik Gowa dan Tallo, Noorduyn (1987a: 312) berpendapat bahwa Islam dibawa ke Bima dan daerah sekitarnya dengan kekuatan senjata (cara kekerasan) oleh orang Makassar, tidak lama setelah Gowa menjadi Muslim dan berhasil mengislamkan sebagian terbesar daerah Sulawesi Selatan antara tahun 1605–1611. Dalam kronik Gowa disebutkan bahwa Bima, Dampo, dan Sumbawa ditaklukkan oleh Karaeng Matoaya, raja

⁵ Dalam artikel H.T Damste, “Islam en Sirih-poean re Bima (Soembawea) Atjehsche Invloeden?”, dalam *BKI* 100 (1941: 55–70) disebutkan bahwa Srinaradireja adalah anak Datuk Dibanda, sedangkan Maharajalela adalah cucunya. Belum diketahui apakah Ince Jayaendra dalam kronik Bima identik dengan Srinaradireja atau Maharajalela, ataukah mereka tokoh yang berbeda.

Tallo yang merangkap sebagai Perdana Menteri Kerajaan Gowa. Disebutkan juga bahwa Gowa empat kali mengirim ekspedisi militernya ke Bima, dua kali ke Sumbawa, dan masing-masing satu kali ke Dompu, Kengkulu (Tambora), dan Papekat (Noorduyn 1987: 312). Ekspedisi pertama dikirim pada tahun 1618, kedua tahun 1619, dan ketiga pada tahun 1626 setelah Karaeng Matoaya dan Raja Gowa berhasil menaklukkan Buton. Ekspedisi yang keempat dikirim pada tanggal 25 November 1632 dipimpin oleh Karaeng Buraqne untuk menumpas pemberontakan yang meletus di Bima sejak 13 November 1632.

Meskipun peristiwa itu tidak dicatat dalam buku harian Kerajaan Bima, sumber VOC menyebutkan bahwa sebuah kapal Belanda (VOC) berlayar dari Batavia dan tiba di Bima pada tanggal 24 Januari 1633 untuk membeli beras dan komoditas lainnya. Kapal itu kembali pada tanggal 23 Mei 1633 dan tidak berhasil menjalankan misinya karena padi, rumah, dan desa terbakar. Seluruh negeri diporakporandakan oleh pasukan Makassar yang terdiri atas 400 buah kapal yang dikirim oleh Raja Makassar untuk menempatkan kembali adik iparnya sebagai Raja Bima setelah dipaksa turun takhta oleh para pemberontak dan melarikan diri ke sebuah pulau dekat Gunung Api.⁶ Chambert-Loir (1982: 153) menghubungkan peristiwa itu sebagai perang suksesi di Kerajaan Bima.

Speelman, gubernur VOC di Makassar, memaparkan aspek lain dari peristiwa tersebut dan menekankan bahwa sesungguhnya sikap anti-Makassar yang menjadi pemicu pemberontakan itu. Orang Bima yang tidak setuju dengan perkawinan sultan dengan wanita Makassar melarikan diri dan berlindung di Kerajaan Dompu, kemudian mengangkat senjata dibantu oleh orang-orang Bima dalam pembuangan. Menurut Speelman, peristiwa itu terjadi sekitar 35 tahun yang lalu (sekitar 1634), yang oleh Noorduyn dihubungkan dengan peristiwa yang sama seperti yang disebutkan dalam kronik Gowa (Noorduyn 1987a: 330 – 333). Berdasarkan informasi Speelman itu, Noorduyn berpendapat bahwa pertempuran yang terjadi pada 1632 – 1633 di Bima bukan perang suksesi seperti yang diduga Chambert-Loir, melainkan suatu pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan Sultan Bima yang pro-Makassar. Ia menambahkan bahwa Sultan Bima yang dimaksud dalam sumber VOC itu adalah Sultan Abdul Kahir yang dalam kronik Gowa dinyatakan telah kawin dengan anak perempuan Raja Gowa (Noorduyn 1987a: 330 – 333).

Pada tanggal 4 Januari 1617, dua orang pendeta Jesuit, Manuel Azevedo dan Manuel Ferreira, tiba di Makassar dari Melaka. Namun, setelah melihat tidak ada prospek untuk menyebarkan agamanya di Makassar, mereka memutuskan untuk pergi ke Bima meneruskan misinya. Kedua pendeta itu datang pada bulan Maret 1618 dan setibanya di Bima mereka menjumpai dua orang utusan dari Jawa (Gairi atau Giri) dan seorang lagi dari Makassar sedang menghadap Raja Bima. Mereka minta kepada raja agar memeluk Islam

⁶ Periksa *Daghregister* (1620-1634: 140; 174) dan Noorduyn (1987: 330). Perebutan kekuasaan antarkeluarga Kerajaan Bima diindikasikan juga oleh sumber lokal. Periksa Abdullah (1981/1982: 13 – 16).

dan menuruti kehendak mereka sebab jika menolak mereka akan diperangi. Dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu Raja Bima belum memeluk Islam, sedangkan ketiga utusan yang dijumpai pendeta itu tidak lain adalah mereka yang meminta agar Raja Bima memeluk Islam secara suka rela sekaligus menginformasikan kemungkinan melaksanakan tindakan militer. Tampaknya upaya diplomatik untuk mengislamkan Raja Bima, seperti dilaporkan oleh Azevedo dan Ferreira, tidak berhasil sehingga tidak lama kemudian Makassar mengirim ekspedisi militernya.

Berkenaan dengan berbagai laporan mengenai Islamisasi di Bima, baik dari orang Portugis, sumber VOC maupun kronik Gowa, Noorduy (1987a: 338) sampai pada satu kesimpulan bahwa Islamisasi di Bima dan daerah sekitarnya berlangsung sebelum pengiriman ekspedisi militer yang keempat, yaitu antara tahun 1626 dan 1632/1633, meskipun sudah dimulai sejak 1618. Hal itu karena berita Portugis menyebutkan serangan orang Makassar yang membawa agama Islam ke Bima berlangsung tidak lama setelah kedatangan Ferreira pada bulan Maret 1618 dan sebelum keberangkatan Azevedo meninggalkan Makassar pada pertengahan tahun 1618. Dengan demikian, peristiwa itu adalah ekspedisi militer pertama yang dikirim ke Bima pada bulan April 1618, tidak lama setelah Ferreira meninggalkan Bima. Adapun Kerajaan Bima yang bercorak Islam (Kesultanan Bima) akan berlangsung beberapa tahun kemudian.

Kronik Bima menyebutkan bahwa Abdul Kahir, Sultan Bima I, memeluk Islam pada tanggal 15 Rabiul Awal 1030 Hijrah bertepatan dengan 7 Februari 1621, tidak lama setelah Raja Gowa mengirim ekspedisi militernya yang kedua pada tahun 1619 (Noorduy 1987a: 338). Namun, perlu diketahui bahwa raja Bima yang pertama memeluk Islam (Sultan Bima I), seperti yang disebutkan dalam kronik, tidak identik dengan tokoh atau raja Bima yang menolak untuk memeluk agama Islam, melainkan keponakannya. Pamannya yang dikenal sebagai Mantau Asi Peka atau Raja Salisi berselisih dengan keponakannya, Ma Bata Wadu, yang pada waktu itu telah memeluk agama Islam. Dengan bantuan pasukan Makassar, Raja Salisi atau Asi Peka dikejar-kejar dan akhirnya ditangkap, dan setelah itu kedudukannya digantikan oleh keponakannya sebagai Sultan Bima yang pertama. Dari kronik Bima diperoleh pula gambaran bahwa pada saat Islamisasi berlangsung, di Bima terjadi perebutan kekuasaan (takhta) di antara keluarga kerajaan, yaitu antara raja yang sedang memerintah dan keponakannya yang kemudian meminta bantuan Kerajaan Gowa. Dengan demikian, faktor dan kondisi sosial politik Kerajaan Bima ikut berperan dalam proses Islamisasi di Bima pada waktu itu. Menurut Noorduy (1987a: 338), terjadinya diskontinuitas di dalam kelas penguasa disebabkan tingginya perbedaan isu-isu keagamaan karena raja tua berkeras kepala menolak untuk memeluk agama Islam. Setelah Raja Bima memeluk Islam, gelar *sangaji* diganti dengan gelar *sultan*, sedangkan para *ncuhi* diubah gelarnya menjadi *galarang*, namun hak raja dan para *ncuhi* tetap seperti semula. Dengan demikian, Sultan Abdul Kahir adalah peletak dasar agama Islam dan pendiri kerajaan Islam Bima. Di dalam sejarah daerah

Bima, Abdul Kahir disejajarkan dengan Sultan Alaudin dan Sultan Malikul Said dari Kerajaan Gowa.

Sultan Abdul Kahir memerintah pada tahun 1620 – 1640 dan sejak itu pula Bima menjadi vasal (daerah taklukan, **Red.**) Kerajaan Gowa. Sebagai vasal, setiap tahun Bima mengirim upeti ke Makassar berupa hasil bumi, kain kasar, kayu, dan kuda. Selain itu, Bima juga berkewajiban memasok Gowa dengan pasukan, baik untuk kepentingan menyerang maupun untuk mempertahankan diri. Hubungan politis Kerajaan Bima dengan Makassar dipererat dengan hubungan perkawinan antara elite penguasa Bima dan putri bangsawan Sulawesi Selatan. Sultan Abdul Kahir sendiri kawin dengan adik ipar Sultan Goa, Alaudin bernama Karaeng Sikontu. Ternyata hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan oleh sultan Bima berikut.⁷ Menurut Noorduyn, perkawinan yang terjadi antara sultan Bima dengan putri sultan atau bangsawan Gowa adalah perkawinan politis, karena melalui perkawinan itu Bima dimasukkan dalam Dinasti Gowa dan mengikat Bima menjadi bagian dari Kerajaan Gowa (Noorduyn 1987b: 324). Namun, dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya antara Gowa dan VOC pada tahun 1667, wilayah kekuasaan Goa berpindah ke tangan VOC, termasuk Bima.

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Setelah Perjanjian Bungaya, Kerajaan Bima diikat oleh kompeni dengan perjanjian-perjanjian. Meskipun demikian, sebagai daerah di luar Jawa, Bima tetap menjalankan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). Bahkan, sejak abad ke-19 secara teoretis *afdeeling* Bima yang meliputi seluruh wilayah Pulau Sumbawa ditempatkan di bawah *Celebes en Onderhoorigheden*. Di dalam praktiknya kerajaan-kerajaan yang ada di pulau itu masih menjalankan *zelfbestuur*. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima, sultan berada dipuncak hierarki kekuasaan, yang dalam bahasa Bima disebut *Ruma Sangaji Mbojo*. Dalam mengendalikan pemerintahan, sultan didampingi oleh sebuah *Dewan Kerajaan* yang disebut *Hadat*. Keberadaan raja atau sultan dan *Hadat* merupakan hal yang umum dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing.⁸ *Dewan Hadat* dipimpin oleh *Raja Bacara* atau *Ruma Bicara*; dalam sumber-sumber VOC jabatan ini sering disebut *Raja Tureli Nggampo*, sedangkan pada masa kejayaan Islam di Bima disebut sebagai *Wazir al Muazam* (Mulyadi 1992/1993: 70). *Raja bicara* dilantik oleh sultan yang dalam praktiknya sering turun-temurun (periksa lampiran). Pejabat ini merupakan saluran penyampaian kehendak raja kepada rakyat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pemimpin dewan

⁷ Sultan Abdul Khair Sirajuddin, Sultan Bima II, kawin dengan Karaeng Bonto Jene, putri Raja Gowa, Sultan Malikul Said; Sultan Nuruddin, Sultan Bima III, kawin dengan Daeng Tamemang, putri bangsawan Gowa Karaeng Lengkese (Lengkoso); sedangkan Sultan Jamaluddin, Sultan Bima IV, kawin dengan Fatimah Karaeng Tanata, putri bangsawan Goa Karaeng Besei (Periksa Haris 1983/1984: 55).

⁸ Di Kerajaan Gowa, *Dewan Kerajaan* semacam itu dikenal sebagai *Batte Salapang*, sedangkan di Kerajaan Bone dengan nama *Arung Pitu* (Periksa Mukhlis P. 1995: 53)

pemerintahan dan sebagai Perdana Menteri.

Sultan dalam pandangan masyarakat Bima masa lalu dianggap sebagai wakil Tuhan. Anggapan itu mengandung makna bahwa menaati perintah sultan merupakan suatu kewajiban, sedangkan menentang perintahnya berarti menentang perintah Tuhan. Meskipun sultan dinyatakan sebagai penguasa tertinggi kerajaan, kekuasaannya dibatasi dan dikendalikan oleh ketentuan *hadat*. Sultan adalah pemegang amanah *hadat*; sejak dilantik ia dihormati dan dimuliakan sebagai pemegang *Ngusi kuasa biasa ro guna*, ia memberikan keputusan perang, hukuman mati dan hubungannya dengan dunia luar. Namun, sultan tidak dapat menggunakan kekuasaan tersebut sebelum dipertimbangkan oleh *Majelis Hadat*. Dengan demikian, *Dewan Hadat* pada dasarnya adalah lembaga penasihat sultan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan.

Sultan dipilih oleh *Dewan Hadat* atas dasar keturunan Dinasti Sang Bima (Morris 1890: 213). Sultan dipilih berdasarkan garis laki-laki (garis ayah), meskipun tidak selalu anak tertua akan menggantikan ayahnya menjadi sultan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang berhak untuk diangkat menjadi *jene teke* (putra mahkota) dan kemudian dilantik menjadi sultan adalah keturunan langsung dari Raja Manggampo Donggo (Ismail 1988: 51). Pelantikan sultan dilaksanakan di pasar, di depan istana yang disebut *amba naE*. Dalam peristiwa itu *jene teke* dipangku *ncuhi dara* sambil duduk di atas onggokan tanah yang sengaja dibuat untuk keperluan itu. Sebelum *jene teke* dilantik, seluruh rakyat yang hadir diwakili oleh tiga *galarang naE* menyampaikan kata-kata yang bernada protes dan ejekan kepada *jene teke* yang diikuti oleh semua anggota *Syara Dana Mbojo* yang hadir. Setelah itu, sultan mengucapkan ikrar atau janji untuk bertindak jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat dan menerima seperangkat *alai* atau regalia kerajaan berupa payung kebesaran dari daun lontar, keris *Samparaja*, dan mahkota yang berhiaskan berlian. Kemudian, acara diakhiri dengan pernyataan setia dari semua anggota *Syara Dana Mbojo* (Ismail 1988: 51).

Dalam *Hikayat Sang Bima* terdapat uraian singkat mengenai penobatan Sultan Ismail, Sultan Bima yang ke-10. Dijelaskan bahwa sebelum penobatan dilaksanakan, sebuah tembok dari tanah dan batu setinggi tempat duduk didirikan di tengah-tengah pasar. Gendang sakti bernama *Si Warajali* diarak dari Bukit Desa sampai ke kota, alat-alat kerajaan dibawa ke pasar dan orang-orang menjaganya selama tiga hari tiga malam sambil menari dan menyanyi. Pada hari yang ditentukan semua orang berkumpul di pasar disertai tepik dan sorak seperti guntur. Sultan diusung ke pasar, diiringi para bangsawan yang berpakaian lengkap. Setelah persiapan selesai, seorang laki-laki duduk berlonjong di atas tembok dengan paha tertutup lapik dan tika, sedangkan seorang laki-laki lain duduk berjongkok tunduk di depan tembok, dijadikan anak tangga sultan naik dan duduk di pangkuan orang yang ada di tempat itu. Setelah itu, *raja bicara* mengucapkan ikrar kesetiaan sambil menaungi sultan dengan payung lontar diikuti oleh para pembesar lainnya. Ikrar inilah sesungguhnya yang merupakan puncak dari upacara itu.

Setelah pembacaan doa, sultan diusung kembali ke istana dan diarak dengan gembira oleh rakyat banyak dan dihormati dengan bunyi meriam dari loji Belanda (Chambert-Loir 2004: 251 – 252; 305 – 330). Meskipun uraian upacara penobatan sultan yang terdapat dalam *Hikayat Sang Bima* agak berbeda dengan uraian sebelumnya, intinya tetap sama. Perbedaan itu mungkin disebabkan nuansa zaman, sebelum dan sesudah Bima di bawah kontrol VOC.

Telah disinggung di atas bahwa *Dewan Kerajaan* atau *Hadat* dipimpin oleh seorang *raja bicara*. Dewan ini beranggotakan 24 orang pejabat tinggi kerajaan dengan gelar *tureli*, *jeneli*, dan *bumi*. *tureli* berjumlah 6 orang, yakni *tureli belo*, *tureli donggo*, *tureli sakuru*, *tureli bolo*, *tureli woha*, dan *tureli parado* (Morris 1890: 116). Menurut Couvreur, *raja bicara* dan *tureli* sebenarnya merupakan nama atau gelar yang senapas, sebab *raja bicara* adalah *tureli*, sedangkan *tureli* satu keturunan dengan raja; *sultan-raja bicara-tureli* adalah gelar atau sebutan yang sama atau setingkat dan mereka itu merupakan elemen pembentuk pemerintahan Kerajaan Bima (Couvreur 1917: 6). Seperti halnya *tureli*, *jeneli* pun berjumlah enam orang, yakni *jeneli rasanaE*, *jeneli sape*, *jeneli monta*, *jeneli bolo*, *jeneli woha*, dan *jeneli parado*. Sebenarnya, jumlah *jeneli* disesuaikan dengan jumlah *kejenelian* karena para *jeneli* itu, selain sebagai anggota *Dewan Hadat*, adalah kepala eksekutif (kepala distrik) di wilayahnya masing-masing. Pada mulanya ada tiga distrik (Belo, Bolo, dan Sape), kemudian berkembang menjadi enam distrik, bahkan pada akhir abad ke-19 – 20 berkembang menjadi 10, dan terakhir menjadi 11. Wilayah *kejenelian* inilah yang sekarang menjadi wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Menurut Couvreur, para *jeneli* adalah *landsvoort* atau *landgroot*, yang di Sulawesi Selatan sama dengan *karaeng* atau *maramba* di Sumba; para *jeneli* mempunyai asal-usul keturunan yang berbeda dengan *sultan*, *raja bicara*, dan *toreli* sebab perkawinan antara laki-laki *toreli* dan wanita *jeneli* atau sebaliknya tidak pernah terjadi (Morris 1890: 116).

Adapun *bumi* berjumlah dua belas orang, yakni *bumi luma rasanaE*, *bumi luma bolo*, *bumi sari mbojo*, *bumi ngampo*, *bumi nata*, *bumi baralau*, *bumi cenggu*, *bumi waworado*, *wumi punti*, *bumi sabanta*, *bumi tente* dan *bumi lawiu*. Ke-12 orang *bumi* ini merupakan *majelis hakim* yang dipimpin oleh *bumi luma rasanaE* dan *bumi luma bolo* (Couvreur 1917: 9). Mereka bertugas mengadili dan memutuskan suatu perkara, tetapi, jika terjadi perbedaan pendapat, keputusan terakhir ada di tangan *raja bicara*. Menurut Couvreur, *bumi* berarti orang bijaksana dan gelar ini setingkat dengan para *jeneli* karena pada kurun waktu tertentu jumlah mereka sama dengan jumlah *jeneli* (Couvreur 1917: 9).⁹ Dalam berbagai sumber gelar *bumi* sering diganti dengan *rato*, misalnya *rato rasanaE* sama dengan *bumi luma rasanaE* dan *rato bolo* sama dengan *bumi luma bolo* dan seterusnya.

Pejabat yang duduk dalam *Dewan Hadat* dipilih oleh rakyat secara bertingkat, artinya rakyat memilih kepala kampung, kemudian kepala kampung memilih *bumi naE*, *jeneli*, dan *tureli*. Mereka secara bersama-sama dan kolegal merupakan *Dewan Kerajaan* (*Dewan Hadat*). Tugas *Dewan Kerajaan*

⁹ Gelar *bumi* sering diganti dengan gelar *rato*, misalnya *rato rasanae* sama dengan *Bumi Luma rasanae*, *rato bolo* sama dengan *bumi luma bolo*, demikian seterusnya.

antara lain mengangkat dan memecat sultan dan menyatakan perang. Mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga hubungan, baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan kerajaan tetangganya. *Raja bicara* sebagai ketua *Dewan Kerajaan* adalah jabatan yang tertinggi dan penguasa negara karena dalam praktik dialah yang menjalankan pemerintahan kerajaan. *Raja bicara* berhak menandatangani kontrak dengan penguasa VOC atau pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil atau atas nama sultan. Menurut Morris (1890: 217), para *toreli* sebenarnya adalah pembesar kerajaan atau mantri tinggi, sedangkan *jeneli* ada di lapis kedua, dan *bumi* adalah mantri biasa.

Adapun tanggung jawab kepolisian berada di tangan *bumi renda*, dibantu oleh para *anangguru mbojo*, *wera*, *mboda nae*, *satutu donggo*, *bicara kae*, *bumi sumpi mbojo* dan *bumi sumpi-sumpi bolo* serta *kapitang* (kapitan) dan *lutanang* (letnan). Dua yang terakhir disebut merupakan pimpinan pasukan bersenjata. Pemanggilan untuk menghadap pengadilan dan eksekusi keputusan pengadilan adalah tugas *bumi renda*. Dalam keadaan perang, *bumi renda* menjadi panglima perang sehingga segala urusan peperangan diserahkan kepada kebijaksanaannya. Untuk urusan luar negeri, ada tiga orang *bumi* yang diperbantukan pada pemerintah tertinggi kerajaan, yaitu *bumi prisi mbojo*, *bumi prisi bolo*, dan *bumi prisi kae*. Mereka bertugas sebagai penghubung orang asing, termasuk urusan dengan gubernemen Hindia Belanda, sebagai juru bahasa. Di bawah para *bumi* ada *galarang kepala* (*galarang kepala belo*, *bolo*, dan *sape*), *galarang* (kepala desa), para *lobe* (lebai), para *cepeweki* (wakil), para *domo dou* (kepala lingkungan kecil), dan para *dalu* dari berbagai kampung. Para *galarang* dipilih penduduk kampung yang bersangkutan dan jabatannya ditetapkan oleh *raja bicara* dengan persetujuan dari sultan.

Di wilayah kekuasaan Kerajaan Bima di Flores Barat (Manggarai), sistem pemerintahan hampir sama. Setiap daerah (*landschap*) dipimpin oleh seorang *naib* yang bertindak sebagai wakil sultan di wilayahnya. Menurut Coolhaas (1942: 170), selain *naib*, masih ada *raja bicara* dan lima orang ratu (*ratu tua bumi rube*, *ratu bumi sarengngembe*, *ratu bumi langawu*, *ratu bumi rarinjaya*, dan *ratu bumi langgara*), seorang *ana' guru sape*, seorang *syahbandar* dan seorang *bumi parisi*. Selain itu, masih ada para *dalu* dan kepala-kepala kampung. Pemukiman pendatang, seperti Bima, Makassar, Bugis, Selayar, dan Bone di ibu kota Reo, dikepalai oleh *galarang*.

Adapun tugas kegamaan diemban oleh *Dewan Syara* (*Sara Dana Mbojo*) yang terdiri atas *khalif*, *imam*, *khatib*, *lebe*, *bilal*, dan *rabo*. Mereka termasuk kelompok dari *ngaji* dan berada di bawah pengawasan seorang khalif yang bergelar *Annangguru Mangaji*. Pada kurun waktu tertentu adakalanya jabatan *khalif* ditiadakan dan dirangkap oleh *raja bicara* atau sultan.

Selain jabatan tersebut, masih ada sejumlah pejabat di lingkungan istana, yaitu *rato parenta*, pejabat yang mengatur urusan kedinasan dan menjadi pemimpin staf istana; *ompu toi*, kepala urusan rumah tangga istana; *bumi nggeko* sebagai ajudan sultan; *bumi ncandi*, yang mengatur ketentuan atau peraturan yang perlu ditegakkan di istana; *bumi pareka*, yang mengatur dan mengawasi kekayaan istana; *bumi roka*, yang bertugas menjaga senjata istana;

bumi ndakatau, yang mengatur konsumsi istana; serta *bumi ndora* dan *bumi sari ntonngu* mengatur ketertiban dan keamanan di istana (Ismail 1988: 52 – 53).

KESIMPULAN

Di pusat Kota Bima hingga kini masih dapat disaksikan dua buah bangunan bekas istana sultan Bima sebagai bukti autentik keberadaan Kesultanan Bima pada masa lalu. Bangunan tersebut adalah *Asi Bou* (Istana Baru) dan *Asi Mbojo* (Istana Bima) yang letaknya berdampingan dalam satu kompleks. *Asi Bou*, yang terbuat dari kayu, dibangun pada tahun 1904 oleh Sultan Ibrahim dan selesai dipugar oleh pemerintah pada tahun 1988 – 1991. Bangunan ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal ahli waris atau keturunan para sultan Bima. Sebaliknya, *Asi Mbojo* adalah bangunan modern dari bata, yang dibangun pada tahun 1927 oleh Sultan Salahuddin,¹⁰ kemudian pernah dipugar pada tahun 1977 – 1979 dan sejak tanggal 11 Agustus 1989 diresmikan atau dialihfungsikan sebagai Museum Daerah Bima dengan nama Museum Asi Mbojo. Bangunan itu paling indah di Kota Bima pada zamannya, dengan halaman seluas 500 meter persegi, pepohonan yang rindang, dan taman bunga yang indah. Istana ini menghadap ke alun-alun *Sorasuba* serta memiliki dua lantai (bertingkat) yang merupakan perpaduan antara arsitektur lokal dan Belanda. Untuk memasuki halaman istana, terdapat dua buah pintu gerbang, yaitu gerbang timur, yang disebut *Lawa Kala*, dan gerbang barat, yang disebut gerbang *Lare-lare*. Gerbang *Lare-Lare* yang merupakan gerbang utama terbuat dari kayu berbentuk panggung. Di tingkat atas, dahulu, tergantung sebuah lonceng dan sebuah tambur yang disebut tambur *rasana'e*. Tambur ini dibunyikan jika ada upacara kebesaran, sedangkan lonceng¹¹ dibunyikan sebagai tanda bahaya dan tanda waktu. Kedua gerbang ini sudah ada sebelum *Asi Bou* dan *Asi Mbojo* dibangun, karena keberadaannya telah diberitakan oleh E. Francis ketika berkunjung ke Bima pada tahun 1851. Di depan istana terdapat sejumlah meriam kuno dan sebuah tiang bendera Kerajaan Bima setinggi 50 meter dari kayu jati. Tiang bendera itu menyerupai tiang kapal perang Kesultanan Bima dan didirikan oleh Sultan Abdullah untuk memperingati pembubaran angkatan laut Bima karena tekanan pemerintah Hindia Belanda.

Tidak jauh dari istana, tepatnya di Desa Paruga, Kecamatan Rasana'e, berdiri Masjid Kesultanan Bima yang dibangun oleh Sultan Abdul Kadim dan Wazir Ismail pada tanggal 16 Zulhijjah 1149 Hijrah bertepatan dengan 5 April 1737 Masehi.¹² Di belakang mihrab terdapat kompleks makam para sultan Bima dan keluarganya, yang dikenal dengan sebutan *makam Kampung Sigi*. Di pemakaman itu dimakamkan Sultan Abdul Kadim (sultan ke-8), Sultan Abdul Hamid (sultan ke-9), Sultan Abdullah (sultan ke-10), Sultan

¹⁰ Istana ini dirancang oleh seorang arsitek kelahiran Ambon bernama Rehatta yang dibuang oleh Belanda ke Bima, dibantu oleh *Bumi Jaro*. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat selama tiga tahun dan selesai pada tahun 1930.

¹¹ Lonceng ini sekarang disimpan di Museum Asi Mbojo dan di atas lonceng terdapat tulisan N. GREVE MF ANNU 1735 (Periksa Chambert-Loir 2004: 287).

¹² Angka tahun ini didapat berdasarkan pembacaan inskripsi pada bangunan mesjid (Periksa Noorduyn 1987b: 86).

Ismail (sultan ke-11), Sultan Abdul Aziz (sultan ke-12), dan Sultan Ibrahim (sultan ke-13). Ada lagi seorang tokoh wanita yang dalam inskripsi pada batu nisannya disebut sebagai *Rantai Patola*. Noorduyn (1987b: 91) mengidentifikasi wanita itu sebagai sultanah ke-7, yakni Kamalat Syah yang sebelumnya bernama Rantai Patola Siti Rabiah. Masih dalam wilayah kecamatan yang sama (Kecamatan Rasanae), terdapat dua kompleks makam sultan Bima yang lain, yaitu Makam Tolo Bali (Makam Gili Pandan) dan Makam Dantraha. Di Kompleks Makam Tolo Bali terdapat makam Sultan Abdul Khair Sirajuddin (sultan ke-2), Sultan Nuruddin (sultan ke-3), dan Sultan Jamaluddin (sultan ke-4), sedangkan di Makam Dantraha, yang terletak di atas bukit dengan ketinggian sekitar 65 meter di atas permukaan laut itu, terdapat makam Sultan Abdul Kahir, sultan Bima yang pertama. Selain bangunan, masih ada sejumlah benda budaya tinggalan Kesultanan Bima yang kini masih disimpan oleh pemerintah daerah, antara lain mahkota sultan yang berhiaskan permata dan keris *samparaja*, lambang kekuasaan Sultan Bima, serta sejumlah benda berharga lainnya.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, L. Massir Q. (1981/1982), *Bo (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat.
- Chambert-Loir, Henry (1982), *Naskah dan Dokumen Nusantara III, Syair Kerajaan Bima*. Jakarta-Bandung: ÉFEO.
- (2004), *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sefarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-École française d'Extrême-Orient.
- Chambert-Loir, Henry dan Siti Maryam R. Salahuddin (ed.) (1999), *Naskah dan Dokumen Nusantara Seri XVIII, Bo' Sangaji Kai, Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: École française d'Extrême-Orient-Yayasan Obor.
- Coolhaas, W. Th. (1942), "Bidrage tot de kennia van het Manggaraische Volk (West flores)", dalam *TNAG* 59: 148 - 177 ; 328 - 360.
- Cortese, Armando (1944), *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East from Read Sea to Japan, written in Malacca and India in 15.11 - 1644*. Diterjemahkan dari Portuguese MS dalam *Bibliothèque de la chambre des Députés*, Paris and disunting oleh Armando Cortese. London: The Hakluyt Society.
- Couvreux, A. (1917), "Aanteekeningen Nopen de Samenstelling van het, Zelfbestuur van Bima", dalam *TBG* 52: 1 – 18.
- Damste, H.T. (1941), "Islam en Sirihpoean to Bima (Soembawa) Atjehsche Invloeden?", dalam *BKI* 100: 55 – 70.
- Faillie, P. de Roo de la (1918), "Studie over Lombosch Adatrecht, Bali en Lombok", dalam *Adatrecht Bundels XV*, hlm. 135 – 140. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Haris, Tawalinuddin (1983/1984), *Naskah Studi Kelayakan Komplek Makam Dantraha dan Tolobali Bima, Nusa Tenggara Barat*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Nusatenggara Barat.
- Haris, Tawalinuddin et al. (1997), *Kerajaan Tradisional Indonesia: Bima*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Ismail, M. Hilir (1988), *Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Naskah belum diterbitkan.
- Jasper, J.E. (1908), "Het Elland Soembawa en zijn Bevolking", dalam *TBG* 34: 60 – 147.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. (1962), *Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff

- Morris, D.F. van Braam (1890), "Nota van toelichting behoerende bij het contract gesloten met het landschap Bima op den 20sten October, and de Regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden", dalam *TBG* 35: 176–233.
- Mulyadi, Sri Wulan Rudjiati (ed) (1992/1993), *Bandar Bima*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noorduyn, J. (1987a), "Makasar and The Islamization of Bima", dalam *BKI* 142: 317–342.
- (1987b), "Bima en Sumbawa, Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultananten Bima en Sumbawa door A. Ligtoet en G.P. Rouffaer", dalam *UKI* 129, Foris Publications Dordrecht Holland/Providense-USA.
- Mukhlis P. (1995), *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Depdikbud, Ditjenbud, Direktorat Jarahnitra, Proyek IDSN.
- Paturu, Abdurrazak Daeng (tt.), *Sedjarah Gowa*. Diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Pigeaud Th. G. Theodore (1967), *Literature of Java vol. 1: Synopsis of Javanese Literature 900 – 1900*. Koninklijk Instituut voor Tall, land en Volkenkunde, Leiden The Hague: Martinus Nijhoff
- Syamsuddin, Helius (1980), "The Coming of Islam and The Role of The Malays as Middelmen on Bima", makalah yang disajikan dalam *The Dutch-Indonesian Historical Conference held at alge Vuursche*, Netherlands, 23 – 27 Juni 1980: 292 – 300.
- Van Dijk, L.J. (1925), "De Zelfbesturende landschappen in de Residentie Timor en Onderhoorigheden", *De Indische Gids*, 530.
- Zollinger, H. (1850), "Verslag van een reis naar Bima en Soembawa en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Flores gedurende de Maanden Mei tot December 1847", dalam *VBG* 23: 121-175.

LAMPIRAN

DAFTAR SULTAN BIMA

1. ± 1620 – 1640 Abdul Kahir, nama anumerta Mantau Wata Wadu (yang mempunyai kubur batu), lahir + 1583, kawin Daeng Melu, wafat 22 Desember 1640.
2. 1640 – 1682 I Ambela Abi'l Khair Sirajuddin, nama anumerta Mantau Uma Jati (yang mempunyai rumh jati), putra pertama, lahir + 1629, kawin Karaeng Bontojene (putri Raja Gowa Muhammad Said) 1646, wafat 23 Juli 1682.
3. 1682 – 1687 Nuruddin Abu Bakar All Syah, nama anumerta Mawa'a Paju (yang membawa payung), putra kedua, nama kecil Mapparabung Daeng Mattalli' Karaeng Panaragang, lahir 13 Desember 1651, kawin Daeng Tamemang 1684, wafat 23 Juli 1687.
4. 1687 – 1696 Jamaluddin Ali Syah, nama anumerta Mawa'a Romo (yang membawa mulut/ laras), putra ketiga. lahir 1673, kawin Karaeng Tanatana 1688, dibuang ke Batavia 1695, wafat 6 Juli 1696.
5. 1696 – 1731 Hasanuddin Muhammad Syah, nama anumerta Mabata Bo'u (yang mempunyai kubur baru), putra keempat, nama kecil Mapatalli' Syaad Syah, lahir 7 September 1689, kawin Karaeng Bissangpole 1714, wafat 23 Januari 1731.
6. 1731 – 1748 Alauddin Muhammad Syah, nama anumerta Manuru Daha (yang berdiam di Daha) putra kelima. nama kecil, Abdullah Sulaiman All Syah, lahir 1706, kawin Karaeng Tanasanga (putri Sultan Gowa Siorajuddin) 1727, wafat 17 atau 27 Mei 1748.
7. 1748 – 1751 Kamalat Syah, putri keenam, nama kecil Rante Patola Sitti Rabi'ah, lahir 27 - 4 -1728, kawin Karaeng Kanjilo 1750, diturunkan oleh Belanda 28 Juni 1751, wafat 31 Agustus 1773.
8. 1751 – 1773 Abdul Kadim Muhammad Syah, nama anumerta Mawa'a Tahoe (yang membawa kebaikan), putra ketujuh, nama kecil Sri Nawa, lahir 10 Juni 1735, wafat 31 Agustus 1773.
9. 1773 – 1817 Abdul Hamid Muhammad Syah, nama anumerta Mantau Asi Saninu (yang mempunyai istana cermin), putra kedelapan, lahir + 1762, wafat 14 Juli 1817.
10. 1817 – 1854 Ismail Muhammad Syah, nama anumerta Mantau Dana Sigi (yang mempunyai tanah mesjid), putra kesembilan, lahir 28 Mei 1797, wafat 30 Mei atau 4 Juni 1854.

11. 1854–1868 Abdullah, nama anumerta Mawa'a Adil (yang membawa keadilan), putra kesepuluh, lahir 1844, wafat 10 Agustus 1868.
12. 1868–1881 Abdul Aziz, nama anumerta Mawa'a Sampela (yang membujang), putra kesebelas, lahir + 1863, wafat 30 Juni 1881.
13. 1881–1915 Ibrahim, nama anumerta Ma Taho Parange (yang baik perangai), putra kesebelas, lahir 19 Februari 1866, wafat 6 Desember 1915.
14. 1915–1951 Muhamad Salahuddin, nama anumerta Marrbora di Jakarta, Ma kadidi Agama (yang meninggal di Jakarata, yang menegakkan agama), putra ketiga belas.

(Chambert-Loir dan Salahuddin [ed] 1999: 607–608)

NAMA RAJA *BICARA* BIMA

1. Mawa'a Bilmana, Tureli Nggampo
2. Makapiri Solo, La Mbila, anak pertama
3. Marrbora Ba Chihu Lambahi, Ma Ama Lima Dai, anak kedua
4. Bumi Renda Manuru Suntu, La Mbila, anak ketiga
5. Mantau Dana Ntori, anak keempat
6. Bumi Luma Kae Marrbora Ese Buton, Abdullah, anak kelima
7. Jeneli Bolo Wau mantau Dana Timu, anak keenam
8. Jeneli Rasana'e, Abdul Ali, anak ketujuh
9. Manggemaci, Ismail, anak kedelapan
10. Nagalere, Muhyidin, anak kedelapan
11. Mambora Ese Reo, Abdullah, anak kedelapan
12. Tureli Donggo Mawa'a Kadi, Abdul Nabi, anak kedelapan
13. Kapenta Wadu, Muhammad Yakup, anak kedua belas
14. Ahmad daeng Manasa, Makalosa Weki
15. Abdul Azis bin Yunus, Bicara Saleko
16. Muhammad Kuraisy bin Muhammad Hidir, cucu ketiga belas
17. Abdul Hamid bin Abdul Maid, keponakan keenam belas

(Chamber-Loir dan Salahuddin [ed] 1999: 609)